



JURNAL  
**AT-TARBIYAT**  
Jurnal Pendidikan Islam



### **Editorial Team:**

#### **Editor in-Chief**

Adi Wibowo, STAI An- Nawawi Purworejo

#### **Editorial Board**

Badrudin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Imam Machali, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Sri Rahmi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
A. Jauhar Fuad, IAI Tribakti Kediri

#### **Managing Editor**

Muhlil Musolin, STAI An- Nawawi Purworejo

#### **Editor**

Ita Nurmala Sari, STAI An- Nawawi Purworejo  
Ahmad Syafi'i, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Ulumuddin, Unwahas Semarang  
Dwi Puji Lestari, STAI Al Hasyimiyyah Jakarta  
Sri Sujarotun, STAI An- Nawawi Purworejo  
Ali Murfi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### **Editorial Assistant**

Isnaini, STAI An- Nawawi Purworejo  
Mujasim, STAI An- Nawawi Purworejo

#### **Alamat Redaksi:**

Prodi Manajemen Pendidikan Islam, STAIAN Purworejo Jl. Ir.H.  
Juanda No. 1 Berjan, Gebang Purworejo 54191 Jawa Tengah  
» Tel / fax : (0275)3128428. e-mail: [jurnalattarbiyat@gmail.com](mailto:jurnalattarbiyat@gmail.com)  
<http://jurnal.staiannawawi.com/index.php/At-Tarbiyat>



## Table of Content

Implementasi Pendidikan Karakter dalam Keluarga Muslim (sebuah pendekatan sosiologis) <b>Hadi Santoso</b> .....	1
Manajemen Ekstrakurikuler Dalam Upaya Pengembangan Diri Santri Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah Yogyakarta <b>Ahmad Hinayatulohi</b> .....	25
Konsep Dasar Epistemologi Pendidikan Multikultural Dalam Islam <b>Zainun Wafiqatun Niam</b> .....	45
Manajemen biaya dan sarana prasarana di SMA n 3 pati dan Ma Silahul Ulum Asempan Trangkil Pati <b>Subaidi</b> .....	69
Interaksi Sosial Pada Remaja Yang Kecanduan Game Online <b>Muhammad Luqman Hadi, Fita Qori' Fatmala</b> .....	88
Sekolah Terpadu;Polarisasi Sistem Pendidikan Indonesia <b>Faizin</b> .....	108
Indeks Penulis .....	84
Ucapan Terima kasih Kepada Mitra Bebestari .....	
<i>Author Guideline</i> .....	

## **Sekolah Terpadu; Polarisasi Sistem Pendidikan Indonesia**

**Faizin**

Universitas Nurul Jadid Probolinggo

Email: faizinsyamwil@gmail.com

**Abstrak**

---

Berbeda dengan pesantren, madrasah adalah tindak lanjut dari pendidikan keagamaan di pesantren, yang mana 30% mata pelajarannya bermuatan agama, kemudian diikuti mata pelajaran-mata pelajaran umum. Pada dekade 20 tahun terakhir, pesantren telah banyak mengadopsi sistem pendidikan madrasah dengan memasukkan mata pelajaran umum pada sistem pengajarannya.

Pengenalan sistem madrasah dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan sekolah yang pada akhirnya menimbulkan dualisme sistem dalam pendidikan nasional. Penekanan pendidikan pesantren pada mata pelajaran agama, seringkali direpons tidak mampu menghadapi era 5.0. Sekolah terpadu berbasis keislaman muncul dan menjadi tawaran baru dalam wacana pengembangan lembaga pendidikan formal di Indonesia.

Sebagai indikasi dari fenomenanya ini adalah diskusi mengenai model pendidikan di Indonesia dari sejak Indonesia berdiri hingga akhir abad 20-an, hanya terdiri dari sekolah umum dan keagamaan (baca: pesantren). Sekolah umum di Indonesia merupakan warisan penjajah Belanda yang pengajarannya memuat ilmu-ilmu umum seperti ilmu alam, ilmu teknik, ilmu sosial, dan Bahasa Inggris. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional dengan ciri khas di dalamnya terdapat masjid, kyai, santri, dan pengajaran kitab kuning.

Pesantren, pada awalnya, hanya mengajarkan 100% mata pelajaran agama. Tujuan pendidikan di pesantren adalah dalam rangka menghasilkan ahli ilmu agama. Eksistensi sekolah terpadu berbasis keislaman menjadi pemantik ideologi pendidikan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Sekolah terpadu, madrasah, pesantren

## Pendahuluan

Pendidikan madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tergolong fenomena modern, yaitu dimulai sekitar awal abad 20 M. Keberadaannya merupakan bentuk usaha modernisasi lembaga pendidikan Islam.<sup>1</sup> Pada awal perkembangan gagasan modernisasi pendidikan Islam, setidaknya, ada dua kecenderungan pokok dalam eksperimentasi pada pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Pertama, terjadinya adopsi sistem dan lembaga pendidikan modern secara hampir menyeluruh. Kedua, eksperimen yang bertitiktolak dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam tradisional di Indonesia.<sup>2</sup> Dengan demikian, madrasah menjadi solusi tengah antara tradisonalisme dan modernisme pendidikan Indonesia.

Niatan memodernisasi lebih lanjut lembaga pendidikan Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1970-an ketika Mukti Ali (Menteri Agama RI), mengenalkan standardisasi sistem pendidikan keagamaan (madrasah) melalui kerjasama dengan 3 (tiga) kementerian yakni Menteri Agama, Menteri dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pada beberapa tahun setelahnya modernisasi pendidikan madrasah ini diperkuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2/1989, yang menyatakan bahwa madrasah merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.<sup>3</sup> Bahkan pemerintah telah memperkuat posisi madrasah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa madrasah

---

<sup>1</sup>Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 53.

<sup>2</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 36.

<sup>3</sup>Ahmad Syarief, *Pengenalan Kurikulum Sekolah dan Madrasah* (Bandung: Citra Umbara, 1995), hlm. 144.

setara dengan sekolah umum.<sup>4</sup> Namun demikian, hingga saat ini madrasah masih tetap menjadi lembaga pendidikan kelas dua.<sup>5</sup> Artinya madrasah masih menjadi pilihan kedua masyarakat setelah sekolah.

Fenomena keterlibatan kalangan santri dalam pendidikan di Indonesia telah menimbulkan adanya mobilitas vertikal dan horizontal, dan bahkan telah memunculkan golongan baru yang sering disebut dengan kelas menengah Muslim.<sup>6</sup> Fenomena ini ditandai dengan menduniannya kaum santri di berbagai sektor profesi dan bahkan banyak yang menjadi pegawai pemerintah. Munculnya kelas menengah Muslim ini acapkali memunculkan sebuah diskusi menarik tentang hubungan Islam dan Negara. Bahkan kaum santri telah menerima Pancasila sebagai ideologi Negara yang menjadi alat pemersatu antara kaum santri dan pemerintah dalam upaya mempercepat proses pembangunan di bangsa dan Negara Indonesia.

Gejala tersebut terjadi seiring dan sejalan dengan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang didukung oleh Presiden Soeharto pada waktu itu, yang merupakan tanda-tanda pergeseran kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan lebih banyak berpihak kepada Islam di akhir tahun 1980-an.<sup>7</sup> Hal ini merupakan bagian

---

<sup>4</sup>Lihat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 17 ayat 1-3 dan pasal 18 ayat 1-4.

<sup>5</sup>Secara umum kualitas madrasah di Indonesia kalah dibanding dengan sekolah-sekolah umum, kecuali beberapa madrasah, semisal Madrasah (Ibtidaiyah dan Tsanawiyah) Pembangunan Jakarta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Malang Jawa Timur, dan Madrasah Aliyah Insan Cendekia Serpong. Di tengah rata-rata kualitas madrasah yang di bawah sekolah umum, beberapa madrasah tersebut memiliki kualitas yang tidak kalah dibanding sekolah-sekolah umum. Baca Azyumardi Azra, *Pendidikan*, hlm. 78, dan Sutrisno, *Fazlur Rahman, Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 203.

<sup>6</sup>Azyumardi Azra, "Kelas Menengah Muslim", *Opini*, Republika, 5 Januari, 2012, hlm. 12., dan Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Kelas Menengah Tujuh Juta Setiap Tahun?", *Opini*, Republika, 10 Januari, 2012, hlm. 12.

<sup>7</sup>Moh Rifa'i, "Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Era Otonomi Daerah," *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): 99-114.

dari usaha-usaha kaum santri untuk mengenalkan simbol dan lembaga keislaman kepada masyarakat luas. Mereka, terutama kelas menengah Muslim, melakukan berbagai percobaan untuk memasukkan materi pendidikan keagamaan ke dalam sistem pendidikan formal. Mereka tidak hanya mengemukakan isu-isu tentang larangan memakai hijab bagi siswi di sekolah umum, tetapi juga berusaha membuat beberapa sekolah Islam yang berkualitas dengan menyandingkan pendidikan sekuler dengan pendidikan Islam. Beberapa contoh sekolah-sekolah model ini antara lain al-Azhar, al-Izhar, Muthahhari, Insan Cendekia, Madania, Bina Insan, Dwi Warna, Lazuardi, Fajar Hidayah, Nurul Fikri, dan Salman al-Farisi.<sup>8</sup> Lembaga pendidikan tersebut membahana di tengah-tengah pendidikan tradisional yang dianut sejak lama.

#### A. Pembahasan

Berbeda dengan madrasah yang kebanyakan mempunyai fasilitas seadanya dan peserta didik yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, kualitas sekolah-sekolah Islam berusaha menampilkan diri menjadi sekolah-sekolah elit dengan cara merekrut peserta didik dari kalangan elit (baca: menengah ke atas) dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang hebat dan mahal, seperti perpustakaan digital, ruangan ber-AC dan beberapa laboratorium. Fasilitas tersebut melengkapi prasyarat sebagai lembaga pendidikan modern berbasis Islam.

Bahkan, di antara mereka ada yang mengadopsi sistem sekolah berasrama (seperti sistem pesantren) yang berorientasi pada penanaman kedisiplinan dan keshalihan peserta didik dalam beragama. Pada dasarnya sekolah-sekolah Islam model ini dibuat seperti sekolah-sekolah umum

---

<sup>8</sup>Azyumardi Azra dan Jamhari, "Pendidikan Islam Indonesia dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio-Historis", Jajat Burhanudin dan Dina Afrianty (penyunting), *Mencetak Muslim Modern Peta Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

dan secara administratif berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, baik dalam penetapan kurikulum, sistem ujian, dan organisasi sekolahnya. Akan tetapi, corak keislamannya tampak pada cara pemberian perhatian pendidikan moral dan keagamaan. Pertumbuhan dan perkembangan sekolah-sekolah Islam seperti ini diyakini terinspirasi dari adanya usaha-usaha Islamisasi pada pendidikan formal dan pertumbuhan Sekolah Islam Terpadu.<sup>9</sup> Hal ini menyembulkan model baru pendidikan di Indonesia dan menarik untuk dilakukan telaah secara lebih mendalam.

Keunikan Sekolah Islam Terpadu mulai diperkenalkan pertama kali oleh para aktivis Jamaah Tarbiyah pada dekade 1980-an. Ide pendirian Sekolah Islam Terpadu ini diawali oleh para aktivis lembaga dakwah kampus yang tersebar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan beberapa universitas ternama yang lain, yang memiliki keprihatinan pada kondisi pendidikan Islam di Indonesia. Para aktivis lembaga dakwah kampus adalah aktivis Islam kampus yang sangat berperan dalam mengajak dan menyebarkan ideologi Islam di kalangan mahasiswa. Kalangan kaum muda memang menjadi target utama gerakan ini, karena mereka memiliki keyakinan bahwa para kaum muda sangat berpotensi untuk menjadi agen perubahan sosial dan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan islamisasi pada seluruh masyarakat Indonesia.<sup>10</sup> Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri baik para pemangku pendidikan tradisional.

Komitmen penyiapan generasi muda Muslim yang memiliki semangat dakwah diyakini akan lebih efektif jika dilakukan melalui pendidikan. Dalam konteks ini, mereka mulai dengan mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Fikri yang dengan berbagai kegiatan

---

<sup>9</sup>Noorhaidi Hasan, *Islamizing...*, hlm. 5.

<sup>10</sup>Baca Zuly Qodir, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 104-107.



dakwah dari berbagai kalangan organisasi Islam dan yayasan-yayasan perseorangan, termasuk al-Furqon, at-Taqwa, al-Ikhlash, Izzuddin, al-Itqon, Auliya, dan Nur Hidayah.<sup>11</sup> Sekolah-sekolah tersebut menjadi model bagi keberadaan sekolah terpadu, yaitu pertemuan antara sains dengan agama.

Eksistensi pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Fikri tersebut merupakan tanggapan terhadap ketidakpuasan beberapa kalangan terhadap Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang dianggap tidak mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan zaman, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan IPTEK. Penerapan sistem pendidikan nasional dianggap telah gagal membentuk moral peserta didik dan melindungi mereka dari penyalahgunaan obat-obat terlarang, seks bebas, dan kenakalan remaja. Kekhawatiran seperti ini terutama menyebabkan orang-orang kota yang secara langsung menyaksikan pengaruh negatif dari modernisasi dan globalisasi. Hal itu juga dipengaruhi oleh adanya kesadaran sebagian kalangan Muslim mengenai perlunya menggabungkan antara ilmu pengetahuan umum dengan pendekatan Islam.

Wacana memadukan sains dan Islam dalam sistem pendidikan menjadi semakin gencar sejalan dengan tumbuh-suburnya ideologi Islam yang sangat agresif dan mencoba diimplementasikan dengan berbagai visi-visi Islam dalam pendidikan, sosial, ekonomi, maupun politik. Hal ini tidaklah dapat dipahami karena para pendiri Sekolah-sekolah Islam Terpadu secara umum mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk mengadopsi dan ingin mengulangi kembali “zaman keemasan Islam” yang dalam anggapan mereka lebih murni dari model pendidikan saat ini.

---

<sup>11</sup>Noorhaidi Hasan, *Islamist Party, Electoral Politics and Da'wa Mobilization Among Youth: The Prosperous Justice (PKS) in Indonesia*, Makalah, S. Rajaratnam School of International Studies Singapore, 2008.

Dalam pandangan mereka, cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan mengembangkan sebuah sistem pendidikan yang terpadu di mana cara hidup dan integritas moral para peserta didik dapat dibentuk secara teratur dengan cara Islam, dan sesuai dengan uswah hasanah Nabi dan Rasul Muhammad saw. serta generasi Islam awal.<sup>12</sup> Dalam sistem ini, para peserta didik secara terus menerus dididik dan dilatih untuk menerima Islam sebagai sistem aturan yang lengkap baik dalam agama, sosial, budaya, dan ekonomi dan mencakup semua urusan material, spiritual, sosial, dan individual.<sup>13</sup>

Yudian Wahyudi mensinyalir bahwa munculnya Sekolah Islam Terpadu disinyalir adalah berawal dari kesadaran umat Islam, khususnya di Indonesia, terhadap pengertian dan makna pendidikan yang sebenarnya menurut al-Quran dan Sunnah. Di mana selama hampir tiga abad lamanya, umat Islam mengalami kemunduran dalam bidang ilmu, baik meliputi ayat ayat kauniyah, quraniyah maupun ayat insaniyah). Dengan semangat inilah lahir Sekolah-sekolah Islam Terpadu.<sup>14</sup>

Sekolah Islam Terpadu berada di bawah satu payung Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), yang berdiri tahun 2003 dengan tujuan mengkoordinir dan menjadi fasilitator berdirinya Sekolah-sekolah Islam Terpadu lainnya. Fokus utama JSIT adalah menggalang spirit solidaritas dan *salafisme* dengan mencontoh tindak tanduk Nabi Muhammad saw. dan khulafaur rasyidin. Sekalipun terdapat bermacam-macam sekolah di bawah payung JSIT namun operasinal sekolah ini berada di bawah

---

<sup>12</sup>Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute, dan Maarif Institute, 2009), hlm. 205.

<sup>13</sup>Noorhaidi Hasan, *Islamizing...*, hlm. 7

<sup>14</sup>Yudian Wahyudi, "Islam dan Nasionalisme: Sebuah Pendekatan Maqaasid Syari'ah," *Makalah*, disampaikan di hadapan sidang senat terbuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka mensyukuri kelahiran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke-55, tanggal 23 September 2006, hlm. 6.

yayasan berbeda, termasuk al-Mu'adz, Insan Mulia, al-Farabi, Ibnu Abbas, Salman al-Farisi, al-Khairat, dan al-Madinah.<sup>15</sup>

Peran JSIT dalam membantu aktivis dakwah Indonesia bisa dikatakan amat penting dalam pengembangan sekolah-sekolah Islam melalui pertukaran jaringan dan informasi. Sebagai *franchise* JSIT menawarkan jasa dan sumbangan yang sangat besar dalam pengembangan dan pembangunan sekolah-sekolah berbasis Islam. Untuk memuluskan perannya, JSIT memberikan *blue-print* dan *guide-line* tentang cara mendirikan sekolah. Sekolah-sekolah yang bergabung dengan JSIT diatur di bawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tetapi masih dibolehkan mengadopsi kurikulum hasil rumusan JSIT.

Sampai saat ini, cabang JSIT tersebar dalam 7 (tujuh) wilayah di seluruh Indonesia, meliputi: (1) Sumatra bagian selatan, (2) Sumatra bagian utara, (3) Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, (4) Jawa Tengah dan Yogyakarta, (5) Kalimantan, (6) Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, dan (7) Sulawesi, Maluku, dan Papua. Setiap cabang regional dipimpin oleh seorang koordinator yang membawahi koordinator distrik. Mayoritas koordinator merupakan aktivis dakwah yang berafiliasi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Salah seorang aktor sangat penting di belakang berdirinya JSIT yaitu Fahmi Alaydroes, yang sekaligus menjadi ketua PKS dalam bidang yayasan pendidikan, Nurul Fikri.<sup>16</sup>

Penelitian tentang Sekolah-sekolah Islam Terpadu menjadi sangat menarik untuk dilakukan setidaknya karena beberapa hal berikut. *Pertama* terjadinya fenomena santrinisasi.<sup>17</sup> Kemunculan dan

---

<sup>15</sup>Noorhaidi Hasan, *Islamizing...*, hlm. 8.

<sup>16</sup>Noorhaidi Hasan, *Islamizing...*, hlm. 10.

<sup>17</sup>Kata santrinisasi merupakan bentuk Inggris dari dari istilah Jawa “santri” yang berarti “mereka yang berasal dari pesantren” atau arti yang lebih umum “mereka  
**115 | At-Tarbiyat Vol. 2 No. 1, Jan-Juni 2019**

berkembangnya Sekolah-sekolah Islam Terpadu menunjukkan adanya dampak dengan jangkauan luas terhadap dinamika masyarakat Muslim Indonesia. Sekolah-sekolah yang disinyalir menjanjikan pendidikan berkualitas tersebut bukan hanya menyumbangkan perbaikan pendidikan Islam di Indonesia, tetapi lebih menarik pada upaya santrinisasi masyarakat Muslim. Proses santrinisasi ini terjadinya bisa dideskripsikan melalui 2 (dua) cara, yaitu, (a), di sekolah-sekolah tersebut, para peserta didik umumnya sudah mengalami “re-islamisasi”. Seperti telah disinggung di atas, bahwa disamping mendalami ilmu-ilmu umum, secara intensif peserta didik juga diharuskan mempelajari ilmu-ilmu keislaman; (b), pengetahuan tentang Islam yang telah diperoleh peserta didik di sekolah, kemudian dibawa ke rumah, dalam banyak tindakan, para peserta didik bahkan berani memberi pelajaran kepada orang tua (keluarga) mereka yang seringkali memiliki pengetahuan sangat minim tentang Islam. Orang tua yang merasa malu karena pengetahuan agamanya dikalahkan anak, maka mereka berupaya belajar kembali tentang Islam dengan tujuan untuk tidak mengecewakan sang anak. Baik dengan cara belajar sendiri maupun dengan mengundang guru privat untuk mengajarkan tentang Islam kepada mereka.<sup>18</sup>

Dari gambaran proses re-islamisasi ini tampak jelas, bahwa terjadi pola baru proses re-islamisasi dan/atau santrinisasi yang muncul dari kalangan kelas menengah Muslim. Re-islamisasi dan/atau santrinisasi bisa muncul tidak hanya di kalangan anak-anak, tetapi dapat terjadi pula di kalangan orang tua mereka. Keunikan pola santrinisasi ini semakin tampak jika ditelusuri secara seksama. Secara tradisional, pada umumnya santrinisasi banyak dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dakwah,

---

yang taat menjalankan ajaran Islam” sebagaimana dilawankan dengan “abangan” kaum muslim hanya dalam nama (nominal Muslim).

<sup>18</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan...*, hlm. 80.

terutama oleh para da'i yang biasanya dilakukan melalui pengajian di masjid-masjid, surau-surau, atau ditempat-tempat lainnya di mana kaum muslim melaksanakan kegiatan keagamaan. Proses santrinisasi oleh Sekolah-sekolah Islam Terpadu ini tampaknya berbeda dari kedua jenis dakwah yang sudah disebut di atas. Seperti perkataan Azra, "Proses santrinisasi melalui sekolah-sekolah elit muslim dapat dikatakan merupakan semacam dakwah diam-diam atau lebih merupakan dakwah organik."<sup>19</sup> Tidak ada dakwah formal dari ruang pengajian.

Perkembangan pemikiran manusia senantiasa mengalami revolusi, terutama dalam hal pendidikan anak. Di masa lampau, banyak keluarga kaya Muslim yang mengirimkan anak mereka ke sekolah-sekolah misionaris yang hingga saat ini kualitasnya masih terkenal baik. Bahkan pernah ada semacam kebanggaan di kalangan orang tua Muslim yang dapat mengirim anak-anak mereka untuk belajar di sekolah-sekolah misionaris. Karena menurut mereka, kegiatan tersebut dapat mengangkat derajat dan martabat keluarga. Inilah alasan, mengapa banyak orang tua Muslim yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Islam tersebut? Sehingga banyak pengamat, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berpendapat bahwa gejala santrinisasi ini merupakan "kebangkitan Islam" di Indonesia. Yang tentu saja, perdebatan ini, baik mengenai jenis, jangkauan, dan implikasi-implikasinya masih tetap berlanjut hingga saat ini dan juga seringkali menimbulkan dualisme; seperti apakah ia bersifat politis atau kultural.

*Kedua*, berkembangnya fenomena islamisme.<sup>20</sup> Islamisme secara tradisional didefinisikan sebagai Islam yang dipahami sebagai ideologi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Islamisme secara sederhana dapat diartikan sebagai mereka yang menggunakan Islam sebagai landasan berpikir dan bergerak. Konsep islamisme masih menjadi konsep yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademi muslim. Banyak pakar yang menolak konsep ini karena penggunaannya dianggap memojokkan umat islam. Sebagai

Namun, pengertian di atas tidak otomatis memberi isyarat bahwa islamisme merupakan penerapan agama pada ranah politik semata. Kelompok islamis seringkali memperluas ide Islam tradisional dalam sebuah pengertian bahwa Islam tradisional adalah agama yang mencakup segala dimensi pada masyarakat modern.<sup>22</sup> Mereka berpandangan bahwa Islam harus menuntut manusia dalam segala bidang kehidupan di masyarakat tersebut, dari cara pemerintahan, ekonomi, sistem hukum, hingga kebudayaan dan pendidikan. Dalam hal ini, islamisme lebih merupakan bentuk tindakan untuk menegaskan kembali pesan-pesan politik, sosial, dan ekonomi yang diperjuangkan oleh kalangan islamis, yang mereka klaim sebagai watak inheren dari sistem itu sendiri, ketimbang merupakan perluasan agama ke wilayah politik.<sup>23</sup>

---

contoh, Prof. Ann Kumar, salah seorang pengajar senior di Australian National University (ANU) menyampaikan keberatan mengenai istilah islamis untuk melabelkan kelompok umat Islam yang berpolitik. Dia berkata, mengapa ketika umat Islam berpolitik dengan berlandaskan diri pada nilai-nilai keagamaan yang dianutnya dengan mudah orang menyebutnya sebagai islamis. Tetapi mengapa orang tatkala orang non-Muslim berpolitik dengan keyakinannya, pengamat Barat tidak serta merta menyebutnya sebagai “Hinduist”, “Buddhist”, ataupun “Cristianist”. Dalam konteks gerakan, istilah Islamis setidaknya mengandung ciri sebagai berikut. Pertama, mereka yang mengedepankan cara-cara damai, konstitusional, dan demokratis. Kedua, mereka yang mengedepankan cara damai, tetapi tidak mengakui demokrasi. Ketiga, mereka yang tidak mengakui konstitusi dan tidak pula menolak cara-cara kekerasan. Keeempat, mereka yang mengakui eksistensi Negara yang ada berikut konstitusinya, tetapi tidak asing dengan cara-cara kekerasan. Kelima, mereka yang mendahulukan cara-cara uang inkonstitusional dan kekerasan. Lihat Firman Noor, “Problematika Istilah Islamis”, dalam *Republika*, 9 Juli 2012, hlm. 4. Sedangkan Oliver Roy mendefinisikan islamisme adalah gerakan-gerakan kontemporer yang menjadikan keyakinan Islam sebagai ideologi politik. Lihat Oliver Roy, *The Failure of Political Islam* (London: I.B. Taurus Publisher, 1994), hlm. ix. Pemakaian istilah islamisme dalam penelitian ini lebih cenderung pada pengertian sederhananya yakni umat Islam yang menjadikan Islam sebagai kerangka berpikir dan melakukan gerakan, tanpa memiliki tendensi negatif.

<sup>21</sup>Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 27.

<sup>22</sup>Oliver Roy, *Globalised Islam: The Search for A New Umma* (London: C. Hurts and Company, 2004), hlm. 58.

<sup>23</sup>Feri Siswanto Nasrul Amin, “Budaya Pendidikan, Budaya Organisasi Dan Budaya Mutu Lembaga Pendidikan Islam,” *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 94–106.

Kaitan antara islamisme dengan Sekolah-sekolah Islam Terpadu dapat dilacak dari sejarah lahir dan berkembangnya lembaga tersebut. Munculnya Sekolah-sekolah Islam Terpadu dipengaruhi oleh gerakan organisasi Ikhwanul Muslimin. Pengaruh tersebut misalnya tampak dalam cara sekolah memberi penekanan terhadap kebutuhan menanamkan kerangka pikir islami ke dalam pola pikir para siswa dan menanamkan komitmen kepada Islam sebagai persiapan proses jangka panjang untuk mengimplementasikan syariah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penekanan ini merupakan kekecewaan dan ketidaksabaran masyarakat terhadap sistem pendidikan yang ada yang diyakini telah mengalami krisis paradigma, visi, misi, pengembangan, manajemen, komunikasi, dan bahkan dalam proses dan pendekatan pembelajaran.<sup>24</sup>

Masalah tersebut dianggap tidak bisa dipisahkan dari penerapan sistem pendidikan sekuler. Meminjam konsep yang diperkenalkan oleh Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, visi Sekolah-sekolah Islam Terpadu adalah untuk mentransformasi generasi muda muslim Indonesia menjadi generasi yang *rabbany*.<sup>25</sup> Generasi *rabbany* adalah generasi yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan dan hanya menjadikan aturan Tuhan sebagai sumber rujukan dan paradigma untuk menuntun pikiran dan tindakan kaum Muslim. Dari perspektif mereka, tidak ada pikiran dan tindakan kecuali didedikasikan untuk mengingat Allah yang menciptakan semua makhluk, yang menciptakan dan memelihara seluruh alam semesta beserta isinya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Amin Abdullah, "Religious Diversity and Islamic Education In Indonesia", *Makalah*, presented in the Open Forum held by USINDO, Washington, November, 21, 2006, hlm. 3.

<sup>25</sup>Suzaina Kadir, "Emerging Trends in Islamic Education in Indonesia", *Makalah*, Lee Kuan Yew School Public Policy, Presented in Redesigning Pedagogy International Conference, Singapore, June 2009, hlm. 10.

<sup>26</sup>Baca Hasan al-Banna, *Majmu'ah Rasa'il al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna* (Beirut: Muassasah al-Islamiyah, tt.), hlm. 181.

Konsep pendidikan Hasan al-Banna telah menginspirasi para aktivis yang dikembangkan oleh gerakan Tarbiyah yang menjadi tulang punggung terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).<sup>27</sup> Pendidikan dianggap memiliki peran penting sebagai basis kampanye kaum Muslim. Sekolah-sekolah Islam Terpadu diharapkan menjadi garda depan di saat kaum Muslim dikalahkan oleh serangan globalisasi. Sekolah Islam Terpadu didirikan dalam rangka mengembalikan kejayaan lembaga pendidikan Islam pada zaman keemasan Islam. Ia dijadikan sebagai jembatan untuk menghapuskan adanya dikotomi antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu keagamaan, ketika dikotomi ini dianggap menjadi penyebab lemahnya lembaga pendidikan Islam. Pada akhirnya, Sekolah Islam Terpadu tidak hanya menjadikan Islam sebagai objek studi semata-mata, tetapi juga sebagai cara hidup, yang mampu menjadikan para siswa tetap *survive* dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan.

Sekolah Islam Terpadu menekankan pelajaran pada penanaman mata pelajaran keagamaan seperti teologi ( akidah ), moral ( akhlaq ), dan ibadah praktis. Sesuai dengan teori pendidikan al-Banna, pendidikan bertujuan membangun karakter dan moralitas peserta didik dengan warna-warni Islam yang direfleksikan dalam cara berpikir, bersikap, dan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan tersebut tidak hanya sekedar untuk menanamkan pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, tetapi pendidikan dijadikan sebagai cara membentuk pribadi Muslim yang utuh baik dari segi berpikir maupun berperilaku.

Dalam konteks ini, sebenarnya pendidikan lebih dijadikan sebagai alat indoktrinasi ideologi kepada anak didik, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, para pencetus dan pendiri Sekolah-sekolah Islam Terpadu sering mengusung tema ideologi Islam pada setiap

---

<sup>27</sup>Noorhaidi Hasan, *Islamizing...*, hlm. 11.



kegiatannya, dengan tujuan untuk menawarkan Islam sebagai ideologi alternatif. Jika hipotesis ini benar, maka fenomena Sekolah-sekolah Islam Terpadu memiliki daya tarik untuk dikaji lebih jauh karena ternyata meruntuhkan sejumlah tesis para ahli yang mengamati dan menelaah perkembangan Islam di Indonesia. Tema tersebut sangat menarik jika dikonfirmasi dengan tesis Kuntowijoyo. Dalam analisis Kuntowijoyo, bahwa sejak tahun 1985, umat Islam di Indonesia sebenarnya sudah meninggalkan periode ideologi, dan saat ini memasuki periode baru yang disebut dengan periode ilmu.<sup>28</sup> Pada periode ideologi, Islam bersifat tertutup. Orientasi perjuangannya lebih menyempit ke politik. Sedangkan pada periode ilmu, umat Islam lebih terbuka (inklusif). Adapun orientasi perjuangannya lebih bersifat kultural. Setelah masa Orde Baru berakhir di samping umat Islam kembali terobsesi dengan politik formal, juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan trans-nasional yang secara terbuka mengusung tema ideologi.

Selain tesis Kuntowijoyo, tema ini juga menarik dikonfirmasi dengan tesis Daniel Bell dalam salah satu karyanya *The End of Ideology*.<sup>29</sup> Menurut Bell, ideologi menjadi salah satu sumber konflik, bahkan telah menyebabkan perang dan menimbulkan banyak korban. Bahkan ideologi telah menjamah banyak aspek kehidupan. Tidak hanya persoalan politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Bagi Bell, ideologi tidak lagi bisa menjadi satu-satunya keyakinan penuh untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik. Bell berpendapat bahwa ideologi sudah tidak bisa menjadi satu-satunya jalan mencapai cita-cita bersama atau dengan ungkapannya yang terkenal “ideologi telah mati.”

---

<sup>28</sup>Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 311-312.

<sup>29</sup>Daniel Bell, *The End of Ideology* (New York: Free Press, 1960), hlm. 196.

Ada empat hal yang akan dijawab dalam artikel ini. Pertama, bagaimanakah genealogi Sekolah Islam Terpadu di Indonesia? Kedua, bagaimanakah konstruksi ideologi pendidikan Sekolah Islam Terpadu di Indonesia? Ketiga, apakah implikasi ideologi pendidikan Sekolah Islam Terpadu terhadap sistem pendidikan yang dikembangkannya? Keempat, bagaimanakah posisi Sekolah Islam Terpadu dalam peta Sistem Pendidikan Nasional?

Dengan mengambil Sekolah Islam Terpadu sebagai fokus masalah, artikel ini berupaya, mengkaji genealogi Sekolah Islam Terpadu sebagai trends baru dalam model pengembangan lembaga pendidikan di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Perkembangan Sekolah Islam Terpadu yang demikian cepat dan respons masyarakat yang demikian antusias menunjukkan bahwa model sekolah tersebut sangat menarik dan mampu mengambil hati masyarakat Indonesia dalam memberi tawaran solusi terhadap krisis pendidikan di Indonesia saat ini.

Juga, mengungkap ideologi pendidikan Sekolah Islam Terpadu juga menjadi tujuan dari penelitian ini. Sekolah Islam Terpadu sebagai sebuah gerakan sosial yang dikembangkan oleh para aktivis Jamaah Tarbiyah di Indonesia mengindikasikan bahwa lembaga pendidikan ini memiliki andil dalam penyebaran ideologi gerakan Islam trans-nasional di Indonesia yang dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin.

Selanjutnya, mengidentifikasi kontribusi ideologi pendidikan Sekolah Islam Terpadu terhadap pengembangan sistem pendidikannya. Setiap ideologi tentu ingin menyebarkan ideologi tersebut sehingga ideologi pendidikan Sekolah Islam Terpadu menjadi landasan pengembangan sistem pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, strategi pendidikan, kurikulum, pendidik, peserta didik, dan komponen pendidikan lainnya.

Terakhir, menjelaskan posisi Sekolah Islam Terpadu dalam peta Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu *causal factor* munculnya Sekolah Islam Terpadu adalah kritik terhadap sistem pendidikan maupun lembaga pendidikan di Indonesia saat ini. Dengan demikian, munculnya Sekolah Islam Terpadu di Indonesia merupakan solusi yang ditawarkan oleh para aktor gerakan sekolah ini untuk perbaikan sistem maupun lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sehingga Sekolah Islam Terpadu memiliki posisi tersendiri yang berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

## B. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini. Bahwa Sekolah Terpadu berbasis Islam muncul dan berkembang karena tiga faktor; gerakan Jamaah Tarbiyah. Pada akhir dekade 1980-an Jamaah Tarbiyah sedang memasuki *mihwar mu'assasi* (tahap pendirian organisasi dan kelembagaan). Para aktivis Jamaah Tarbiyah mendirikan sekolah ini karena semakin terbukanya struktur kesempatan politik pada masa Orde Baru ketika pada saat itu rezim Orde Baru melakukan politik akomodasi kepada umat Islam Indonesia. Selain mendirikan Sekolah Islam Terpadu, para aktivis gerakan Jamaah Tarbiyah juga mendirikan KAMMI dan Partai Keadilan (PK).

Yang terpenting bahwa konstruksi ideologi pendidikan Sekolah Islam Terpadu merupakan pengejawantahan konsep Islam *kāffah* yang diadopsi dari ideologi Ikhwanul Muslimin. Adapun ideologi pendidikan Sekolah Islam Terpadu menjadi acuan dalam pengembangan sistem pendidikannya, yang meliputi tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, strategi pendidikan, relasi pendidik dan anak didik, serta pengelolaan kelas. Dengan demikian sekolah berbasis keislaman merupakan integrasi sains dan agama dan subsistem pendidikan nasional. Adopsi kurikulum

dan sistem penilaian dari sistem pendidikan nasional yang dilakukan oleh Sekolah Islam Terpadu semakin mempertegas bahwa lembaga pendidikan yang sedang berkembang ini masih menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia sebagaimana halnya dengan pesantren, madrasah, maupun sekolah umum.

Abdullah, Amin. "Religious Diversity and Islamic Education In Indonesia", *Makalah*, presented in the Open Forum held by USINDO, Washington, November, 21, 2006.

Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

Azra, Azyumardi. "Kelas Menengah Muslim", *Opini*, Republika, 5 Januari, 2012.

Azra, Azyumardi dan Jamhari. "Pendidikan Islam Indonesia dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio-Historis", Jajat Burhanudin dan Dina Afrianty (penyunting), *Mencetak Muslim Modern Peta Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

(al) Banna, Hasan. *Majmu'ah Rasa'il al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna*. Beirut: Muassasah al-Islamiyah, tt.

Bell, Daniel. *The End of Ideology*. New York: Free Press, 1960.

Fealy, Greg dan Anthony Bubalo. *Jejak Kafilah Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2007.

Kadir, Suzaina. "Emerging Trends in Islamic Education in Indonesia", *Makalah*, Lee Kuan Yew School Public Policy, Presented in Redesigning Pedagogy International Conference, Singapore, June 2009.

Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan, 2001.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. "Kelas Menengah Tujuh Juta Setiap Tahun?", *Opini*, Republika, 10 Januari, 2012.

Hasan, Noorhaidi. *Islamist Party, Electoral Politics and Da'wa Mobilization Among Youth: The Prosperous Justice (PKS) in Indonesia*, *Makalah*, S. Rajaratnam School of International Studies Singapore, 2008.

Qodir, Zuly. *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas*, terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 2000.

Rahman, Fazlur. *Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Roy, Oliver. *The Failure of Political Islam*. London: I.B. Taurus Publisher, 1994.

Roy, Oliver. *Globalised Islam: The Search for A New Umma*. London: C. Hurts and Company, 2004.

Syarief, Ahmad. *Pengenalan Kurikulum Sekolah dan Madrasah*. Bandung: Citra Umbara, 1995.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 17 ayat 1-3 dan pasal 18 ayat 1-4.

Wahid, Abdurrahman. (ed.), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute, dan Maarif Institute, 2009.

Nasrul Amin, Feri Siswanto. "Budaya Pendidikan, Budaya Organisasi Dan Budaya Mutu Lembaga Pendidikan Islam." *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 94–106.

Rifa'i, Moh. "Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Era Otonomi Daerah." *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): 99–114.